

PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, KOMITMEN ORGANISASI, SISTEM INFORMASI PADA KESIAPAN PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

Ida Bagus Gede Bayu Permana¹
I Dewa Nyoman Wiratmaja²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: guzbayu21@gmail.com/ telp: +6285 73 900 9885

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 63 Tahun 2013, bahwa pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota sudah harus menerapkan laporan keuangan berbasis akrual pada laporan keuangan tahun 2015. Oleh karena itu, kesiapan penerapan sistem yang baru membutuhkan dukungan dari kesiapan Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Sistem Informasi pada Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Penelitian ini dilakukan pada bagian keuangan Sekretariat daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Regresi Linier Berganda dengan menggunakan 74 responden. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Sistem Informasi berpengaruh positif signifikan pada Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kata kunci: kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi, penerapan SAP berbasis akrual

ABSTRACT

Based on Government Regulation No. 71 Year 2010, which was confirmed by the Minister of Home Affairs number 63 in 2013, that the provincial government, district and city already must implement accrual-based financial statements in the financial statements of 2015. Therefore, the readiness of the implementation of the new system requires support of the readiness of Human Resources, Organizational commitment and Systems. This study aimed to examine the effect of Human Resources, Organizational Commitment and Implementation Readiness Information System on Local Government Finance Report Based Accrual. Research was conducted on the financial section Secretariat Badung regency. This study uses data analysis techniques Regression using 74 respondents. Hypothesis test results indicate that the influence of Human Resources, Organizational Commitment, and Information Systems Readiness significant positive effect on the adoption of Local Government Finance Report Based Accrual.

Keywords: *the quality of human resources, organizational commitment, information systems, implementation of accrual-based SAP*

PENDAHULUAN

Pemerintah masih secara terus menerus melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan negara, reformasi pengelolaan keuangan negara telah melahirkan paket

undang-undang yang mengatur bidang keuangan negara yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang membahas tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 yang membahas tentang perbendaharaan Negara, dan undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dari ketiga undang-undang yang mengatur bidang keuangan negara tersebut kemudian muncul beberapa peraturan pemerintah yang pada dasarnya mendukung penerapan undang-undang tersebut dan membantu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pemerintah dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mempunyai tujuan untuk memberikan suatu pedoman dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah pusat maupun pada tingkat daerah. SAP merupakan suatu yang nantinya akan membantu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, pemerintah membentuk sebuah komite standar independen yang ditetapkan oleh keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP).

Menurut Wijaya dalam Faradillah (2013), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Menurut Faradillah (2013) SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan

auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (1) tentang keuangan negara, mengatakan bahwa dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja menerapkan basis akrual, selama basis akrual belum dilaksanakan maka digunakan basis kas menuju akrual. Dalam upayanya untuk memenuhi maksud dari undang-undang nomor 17 tahun 2003 tersebut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menggantikan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pencatatan keuangan berbasis akrual telah sah untuk segera dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahan.

Menurut Kusnadi, (1999:106) Dasar akuntansi akrual mengakui dan melaporkan efek transaksi dan kejadian lainnya atas aktiva, utang, penghasilan dan beban dari suatu organisasi bisnis dan jika dalam organisasi pemerintahan pada dana atau transaksi uangnya (kasnya) masih belum diterima atau belum dibayar. Akuntansi pemerintahan berhubungan dengan penghasilan dan pengeluaran terlebih pada penerimaan dan beban pemerintah. Oleh karena itu,

hanya dasar akrual yang dapat diperbandingkan kepada pendapatan pada periode terjadinya peristiwa.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 terdiri dari dua lampiran. Lampiran I merupakan standar akuntansi berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Sedangkan lampiran II merupakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Pada lampiran II dari peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 merupakan lampiran yang menuliskan kembali isi dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikitpun. Batas masa transisi yang dimaksud dalam lampiran II adalah empat kali masa anggaran setelah peraturan pemerintah ini terbit yang mempunyai arti bahwa maksimal penggunaan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual adalah akhir tahun 2014.

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ini memberikan dampak yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia mulai meninggalkan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan berbasis kas menuju akrual dan kemudian mulai secara perlahan menjalankan sistem pelaporan keuangan berbasis akrual secara penuh. Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 juga diharapkan mampu memberikan informasi yang utuh mengenai posisi keuangan negara dan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban.

Akuntansi berbasis akrual seperti yang dimaksud adalah suatu sistem akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lainnya yang diakui

dicatat dan disajikan berdasarkan waktu terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas atau secara kas nya dibayarkan atau dilunasi. Karena akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lainnya yang diakui dicatat dan disajikan berdasarkan waktu terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas nya dibayarkan atau dilunasi maka akuntansi berbasis akrual akan memberikan gambaran paling riil mengenai posisi keuangan suatu entitas.

Perubahan sistem pelaporan dari akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual secara penuh pastinya akan menimbulkan dampak terhadap satuan kerja pemerintahan walau sekecil apapun. Perubahan menuju ke arah yang baik ini bukan berarti berjalan mulus tanpa hambatan, masalah akan selalu ada dalam sebuah perubahan khususnya dalam lingkungan satuan kerja pemerintahan.

Menurut Sumarsono (2003;4) sumber daya manusia mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu berkerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh karena pentingnya SDM dalam mempengaruhi berbasis akrual tersebut, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia dibidang akuntansi pemerintahan. Menurut

Herlina (2013) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Selain itu penerapan basis akrual juga ditentukan oleh sistem yang digunakan.

Kurniawan (2011) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuantujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Luthans (2002:235) mengatakan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu sikap mengenai kesetiaan karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Sikap ini merupakan suatu proses yang berlangsung terus menerus (*kontinyu*) dimana karyawan juga memperlihatkan kepedulian tinggi pada organisasi, sehingga komitmen organisasi merupakan sikap kerja yang bersifat tahan lama (*durable*) dan stabil.

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Dalam hal ini, salah satu penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa kementerian/lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (Simanjuntak, 2010).

Menurut Nash, John F. (1995:8) menyatakan bahwa sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Dari pengertian tersebut sistem informasi menunjukkan bahwa fungsi utamanya adalah menyediakan informasi sebagai penunjang yang membantu proses perencanaan, pengendalian serta fungsi manajemen. Dengan demikian, maka segala bentuk proses pekerjaan rutin maupun transaksi manajemen akan tertata dengan rapi. Dalam hal ini teknologi informasi berupa hardware dan software yang memadai untuk melaksanakan SAP berbasis akrual diharapkan dapat membantu satuan kerja dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Faradillah (2013) kompleksitas dalam penerapan basis akrual membutuhkan sistem yang lebih terpadu dan didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Hal ini tentu saja membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit untuk dapat mewujudkannya. Menurut *Cushing, Barry. E* (1995:17) Sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai kumpulan manusia dan sumber-sumber modal didalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi.

Selain ketiga faktor tersebut juga diperlukan sosialisasi dari pemerintah pusat maupun daerah. Untuk itu perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik. Pada penelitian sebelumnya, Faradillah (2013) dengan penelitian “Analisis pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010)” menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makasar dalam implementasi Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya peneliti ingin membuktikan pengaruh ketiga faktor dalam kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada satuan kerja yang terdaftar di pemerintahan kabupaten Badung. Responden dari penelitian ini adalah satuan kerja yang berpartisipasi dalam seluruh pembuatan laporan keuangan sehingga dirasa cukup kuat sebagai acuan pemilihan wilayah untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki wilayah kerja paling luas di daerah kabupaten badung. Sehingga menurut peneliti wilayah kerja kantor pemerintahan kabupaten Badung diharapkan mampu memberikan acuan tempat yang bisa mereprestasikan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual?; (2) apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual?; dan (3) apakah sistem informasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap penerapan SAP berbasis akrual, untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual dan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

Menurut *Nash, John F.* (1995:8) menyatakan bahwa sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Dari pengertian tersebut sistem informasi menunjukkan bahwa fungsi utamanya adalah menyediakan informasi sebagai penunjang yang membantu proses perencanaan, pengendalian serta fungsi manajemen. Dengan demikian, maka segala bentuk proses pekerjaan rutin maupun transaksi manajemen akan tertata dengan rapi. Dalam hal ini teknologi informasi berupa hardware dan software yang memadai untuk melaksanakan SAP berbasis akrual diharapkan dapat membantu satuan kerja dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut *Faradillah* (2013) kompleksitas dalam penerapan basis akrual membutuhkan sistem yang lebih terpadu dan didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Hal ini tentu saja membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit untuk dapat mewujudkannya. Menurut *Cushing, Barry. E* (1995:17) Sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai kumpulan manusia dan sumber-sumber modal didalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi.

Penelitian *Rahmayati* (2012) dan *Choirunisah* (2008) juga menemukan bukti bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Negara/lembaga, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh

Maulida (2009) yang menyatakan bahwa setiap tindakan suatu organisasi menerapkan informasi atau system baru tidak lepas dari peran sumber daya manusianya. Hal ini memberikan bukti bahwa pemahaman terhadap peraturan, penempatan sesuai latar belakang pendidikan, pemahaman uraian pekerjaan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sangat diperlukan agar penerapan SAP berbasis akrual dapat diwujudkan. Selain itu, meskipun penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual telah dipermudah dengan bantuan aplikasi, kesalahan masih mungkin terjadi jika proses input data dilakukan tidak benar, sehingga kemampuan sumber daya manusia tetap memiliki peran yang krusial dalam hal ini.

H₁: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

Penelitian Aldiani (2010) menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP. No. 24 tahun 2005. Artinya, semakin tinggi suatu komitmen dari setiap satuan kerja, maka semakin siap satuan kerja dalam penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian Fajrianthi, Ayu Bianda Pramadani (2012) menghasilkan hal yang sama yaitu komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap suatu instansi atau organisasi untuk menerima perubahan. Dalam penelitian Julita (2010) dikatakan bahwa karyawan yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi akan mengerahkan segalanya kepada organisasi untuk membantu organisasi dalam menjalani perubahan, mereka juga berkata bahwa komitmen organisasi merupakan predictor terbaik dalam perubahan dibandingkan dengan kepuasan kerja.

Sejalan dengan penelitian Julita (2010) penelitian Aldiani (2010) juga menunjukkan bahwa pegawai pemerintah yang berkomitmen akan bekerja secara maksimal karena mereka menginginkan kesuksesan organisasi tempat dimana mereka bekerja. Pegawai pemerintah yang berkomitmen tinggi karena berikir perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal akan memiliki pemahaman atau penghayatan terhadap penyusunan pelaporan keuangan sesuai dengan SAP. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kinerja mereka karena adanya keyakinan bahwa visi dan misi pemerintah akan tercapai dengan sumbangsih mereka.

H₂: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

Komunikasi memegang peranan penting dalam penerapan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk dalam penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini konsisten dengan pendapat Warsino (2009) yang menyatakan bahwa dengan komunikasi yang baik, seluruh komponen dalam organisasi akan dapat bekerja secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas khususnya dalam hal pengelolaan keuangan.

Terdapat dua tipe komunikasi yang dilakukan dalam suatu organisasi, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Tipe komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi internal antara rekan sejawat atau atasan dan komunikasi eksternal antar satuan kerja. Komunikasi yang lancar baik internal maupun eksternal akan mempercepat penyampaian informasi penting terkait

penerapan SAP berbasis akrual sehingga satuan kerja segera dapat merespon dan menjalankan ketentuan yang ada.

H₃: Komunikasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis Akrual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Badung karena pemerintahan daerah tersebut mempunyai APBD terbesar di Provinsi Bali. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Badung beserta staf Bagian Keuangan dipilih sebagai responden karena responden tersebut bertindak sebagai pemberi kebijakan maupun pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan PP. No 71 Tahun 2010. Ditinjau dari rumusan masalah dan hipotesis yang telah diuraikan, maka variabel yang diamati dan dianalisis dalam penelitian ini meliputi, variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerapan PP No. 71 tahun 2010 (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia (X₁), komitmen organisasi (X₂) dan sistem informasi (X₃)

Dalam penelitian ini, variabel Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 ini diambil dari wawancara dalam penelitian Sari (2009) yang kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan dalam penelitian Ardiansyah (2013). Variabel terikat ini akan diukur dengan skala Likert 1-4.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berjumlah 5658 pegawai. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *Judgment Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan

kriteria yang ditentukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan yang maksimal (Arikunto, 2002). Sampel penelitian ini adalah seluruh pegawai golongan II/a sampai dengan IV/d pada bagian keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Badung ditetapkan pegawai berstatus PNS dan golongan II/a sampai dengan IV/d didasarkan atas pertimbangan bahwa pegawai tersebut merupakan pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan sehingga dipandang paling kompeten untuk dijadikan Responden. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan beserta Staf bagian keuangan sekretariat daerah pemerintahan Kabupaten Badung.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan survey, yang menggunakan instrument kuesioner untuk berkomunikasi dengan responden – respondennya (Jogiyanto, 2008:4). Kuesioner penelitian ini ditunjukkan kepada responden. Jawaban-jawaban dari responden tersebut kemudian diberi nilai dengan berdasarkan skala Likert interval 4 (empat) jenjang dimana responden diberi kebebasan untuk menentukan pendapat pada kuesioner tersebut. Skala ini digunakan untuk sikap, pendapat, maupun persepsi seseorang tentang fenomena-fenomena sosial yang ditetapkan secara spesifik dalam kuesioner oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan analisis regresi linear berganda. Analisis model linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel terkait dan variabel bebas dengan bantuan *Software Statistical Package for social science (SPSS) for windows*. Model regresi linier berganda ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e..... (1)$$

Keterangan:

- Y = Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrua
 a = Konstanta
 X_1 = Kualitas sumber daya manusia
 X_2 = Komitmen organisasi
 X_3 = Sistem informasi
 β_1 = Koefisien regresi variabel X_1
 β_2 = Koefisien regresi variabel X_2
 β_3 = Koefisien regresi variabel X_3
 e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai di bagian Keuangan Setda Kabupaten Badung. Pegawai yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah pegawai golongan II sampai golongan IV yang telah berstatus PNS. Berikut Tabel 1 menunjukkan data jumlah kuisisioner yang disebar dan pengembalian kuisisioner.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kuisisioner yang digunakan dalam penelitian sejumlah 74 set. Kuisisioner tidak dapat dipakai sebanyak 0 set, maka *response rate* sebesar 100 persen menunjukkan pihak KAP cukup baik berpartisipasi dalam dunia pendidikan.

Tabel 1.
Data Jumlah kuisisioner yang disebar dan Pengembalian

Keterangan	Jumlah
Kuisisioner yang disebar	74
Kuisisioner yang tidak kembali	0
Kuisisioner yang dikembalikan	74
Kuisisioner yang tidak bersedia diisi	0
Kuisisioner yang digunakan	74

Tingkat pengembangan (response rate):

$74/74 \times 100$ persen = 100 persen

Tingkat pengembalian yang digunakan (*usability response rate*)

$74/74 \times 100$ persen) = 100%

Sumber : Data primer diolah (2015)

Dalam penelitian ini karakteristik responden penelitian pada Bagian Keuangan Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Badung dilihat dari beberapa kriteria, yaitu : jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan pangkat.

Berdasarkan kriteria jenis kelamin gambaran tentang responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	26	35,14
Perempuan	48	64,86
Total	74	100

Sumber : Data primer diolah, 2015

Pada Tabel 2 dapat dinyatakan bahwa responden laki-laki sebanyak 26 responden atau sama dengan 35,14 persen dan sisanya adalah responden perempuan yaitu sebanyak 48 responden 64,86 persen.

Karakteristik responden berdasarkan Umur responden dibagi 4 kategori. Keempat kategori tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Karakteristik Responden Menurut Umur

Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
20 - 25	5	6,76
26 – 30	17	22,97
31 – 35	26	35,14
36 – 40	21	28,38
>40	5	6,76
Total	74	100

Sumber : Data primer diolah, 2015

Pada Tabel 3 dapat dinyatakan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki umur berkisar 31 – 35 tahun sebanyak 26 orang atau

sebesar 35,14 persen, umur 36 – 40 tahun sebanyak 21 orang atau sebesar 28,38 persen, umur 26 – 30 sebanyak 17 orang atau sebesar 22,97 persen, umur 20 – 25 sebanyak 5 orang atau 6,76 persen umur > 40 sebanyak 5 orang 6,76 persen.

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dibagi 3 kategori. Ketiga kategori tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
SMA	4	5,41
Diploma	21	28,38
S1	49	66,22
Total	74	100

Sumber : Data primer diolah, 2015

Pada Tabel 4 dapat dinyatakan bahwa dari karakteristik tingkat pendidikan responden mayoritas mempunyai tingkat pendidikan S1 sebanyak 49 orang atau sebesar 66,22 persen, pendidikan Diploma sebanyak 21 orang atau sebesar 28,38 persen dan SMA sebanyak 4 orang atau sebesar 5,41 persen.

Karakteristik responden berdasarkan pangkat dibagi 3 kategori. Ketiga kategori tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Karakteristik Responden Menurut Lama Kerja

No	Pangkat (Golongan)	Jumlah responden (orang)	Persentase(Persen)
1	Golongan II	21	28,35
2	Golongan III	51	68,92
3	Golongan IV	2	2,70
	Total	50	100

Sumber : Data primer diolah, 2015

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah responden mayoritas mempunyai pangkat atau golongan III sebanyak 51 orang atau sebesar 68,92 persen, golongan

II sebanyak 21 orang atau 28,35 persen dan golongan IV sebanyak 2 orang atau 2,70 persen.

Valid menurut Sugiyono (2009:109) berarti instrument dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada dasarnya validitas ini berfungsi untuk mengukur atau menguji apakah tiap-tiap butir instrumen telah benar-benar mengungkapkan indikator yang ingin diteliti. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh koefisien korelasi dari 20 indikator dengan 30 orang responden memiliki nilai lebih besar dari 0,3 maka disimpulkan seluruh indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hasil uji validitas seperti pada lampiran 5 menunjukkan bahwa keseluruhan indikator layak digunakan memiliki nilai korelasi diatas 0,3 ini berarti seluruh indikator yang digunakan dalam kuisioner penelitian dinyatakan valid.

Pengujian reliabilitas atau keandalan instrumen menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran kembali terhadap gejala yang sama. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data atau jawaban yang sama pula. Instrumen dikatakan handal apabila memiliki *cronbach's alpha* lebih dari 0,60. (Sugiyono, 2012:172).

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian dikatakan reliabel dimana keseluruhan instrumen layak digunakan untuk mengumpulkan data. Seluruh nilai *cronbach's alpha* $\geq 0,6$ ini berarti pengukuran tersebut dapat memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama pada waktu yang berbeda.

Rata-rata skor untuk variabel kualitas sumber daya manusia adalah 3,37 yang berarti bahwa sebagian besar responden persepsi yang untuk item pernyataan pada variabel kualitas sumber daya manusia. Indikator pertama merupakan indikator yang mempunyai nilai skor rata-rata tertinggi yaitu penempatan pegawai dukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki persepsi yang tinggi terhadap seluruh indikator yang terdapat dalam variabel Kualitas sumber daya manusia.

Rata-rata skor untuk variabel komitmen organisasi adalah 3,37 yang berarti bahwa secara keseluruhan responden setuju terhadap item pernyataan pada variabel komitmen organisasi. Indikator pertama merupakan indikator yang mempunyai nilai skor rata-rata tertinggi yaitu dalam penyusunan laporan keuangan, kantor tempat saya bekerja mempunyai komitmen yang tinggi dalam penyelesaiannya. Secara keseluruhan menunjukkan seluruh responden setuju dengan indikator yang terdapat pada variabel komitmen organisasi.

Rata-rata skor untuk variabel sistem informasi adalah 3,42 yang berarti bahwa secara keseluruhan responden setuju terhadap item pernyataan pada variabel sistem informasi. Indikator pertama merupakan indikator yang mempunyai nilai skor rata-rata tertinggi yaitu software yang digunakan sangat membantu saya dalam menyelesaikan pembuatan laporan keuangan berbasis akrual. Secara keseluruhan menunjukkan semua responden setuju dengan indikator yang terdapat pada variabel Sistem informasi.

Rata- rata skor untuk variabel kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 adalah 3,27 yang berarti bahwa secara keseluruhan responden setuju terhadap item pernyataan pada variabel Kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010. Indikator pertama merupakan indikator yang mempunyai nilai skor rata-rata tertinggi yaitu saya telah mempelajari dan memahami sepenuhnya tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diamanatkan pada PP No. 71 tahun 2010. Secara keseluruhan responden menyatakan setuju dengan indikator yang terdapat dalam variabel kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010.

Untuk menguji pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Sistem Informasi terhadap kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010, maka digunakan analisis statistik regresi linier berganda. Analisis tersebut diolah dengan paket program komputer, yaitu *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Hasil dari analisis tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 6.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Nama Variabel	Koefisien Regresi	t-test	Sig. t
Kualitas sumber daya manusia	0,159	2,250	0,028
Komitmen organisasi	0,253	2,169	0,033
Sistem informasi	0,283	2,243	0,028
Konstanta		0,151	
R		0,763	
R <i>square</i>		0,583	
F hitung		32,610	
F sig		0,000	

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh suatu persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,151 + 0,159X_1 + 0,253X_2 + 0,283X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Kita dapat melihatnya dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan, dimana data tersebut dikatakan berdistribusi normal bila nilai *Asymp.sig* > *alpha*, yang dapat dilihat dari *Kolmogorov-Smirnov test* (Ghozali, 2012:141). Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig* sebesar $0,548 > \alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

Tabel 7.
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	74
Kolmogorov-Smirnov Z	0,798
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,548

Sumber : Data diolah, 2015

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui bahwa pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas digunakan model *glejser*, dengan syarat nilai signifikansi berada di atas 0,05 yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2012:139). Hasil uji ini dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig.	Keterangan
1.	Kualitas sumber daya manusia	0,774	Bebas heteroskedastisitas.
2.	Komitmen organisasi	0,195	Bebas heteroskedastisitas.
3.	Sistem informasi	0,054	Bebas heteroskedastisitas.

Sumber : Data diolah, 2015

Dalam Tabel 8 memperlihatkan tingkat signifikansi tiap variabel bebas di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan model regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada atau tidaknya hubungan yang linier (multikolinieritas) antara variabel bebas (independen) satu dengan variabel bebas yang lain. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat hasil dari nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10 yang berarti tidak terdapat gejala multikolinieritas (Ghozali, 2012:105). Tabel 9 menunjukkan hasil uji multikolinieritas.

Tabel 9.
Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	Kualitas sumber daya manusia	0,333	3,005
2	Komitmen organisasi	0,365	2,742
3	Sistem informasi	0,431	2,322

Sumber : Data diolah, 2015

Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel bebas berada di atas 0,1 dan nilai VIF berada di bawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model OLS dalam menjelaskan hubungan antara kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan sistem informasi dengan kesiapan penerapan laporan keuangan. Model dianggap layak apabila signifikansi F hitung $< 0,05$. Berdasarkan rangkuman hasil analisis data pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai sig F test adalah sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti model regresi linier berganda yang terbentuk

secara signifikan mampu menjelaskan hubungan antar kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan sistem informasi dengan kesiapan penerapan laporan keuangan. Oleh karenanya pengujian selanjutnya untuk menguji pengaruh masing-masing variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan sistem informasi terhadap kesiapan penerapan laporan keuangan dapat dilanjutkan.

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk kualitas sumber daya manusia adalah 0,028. Nilai 0,028 lebih kecil dari α 0,05 sehingga pada tingkat keyakinan 95% variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010. Nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,159 bernilai positif, yang berarti kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh pada semakin tingginya kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010.

Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulida (2009) yang menyatakan bahwa setiap tindakan suatu organisasi dalam menerapkan sistem baru tidak lepas dari peran sumber daya manusianya. Hal ini memberikan bukti bahwa pemahaman terhadap peraturan, penempatan sesuai latar belakang pendidikan, pemahaman uraian pekerjaan, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sangat diperlukan agar penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai Signifikansi untuk komitmen organisasi adalah 0,033. Nilai 0,033 lebih kecil dari α 0,05 sehingga pada tingkat keyakinan 95% variabel komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010. Nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,253 bernilai positif, yang berarti kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi akan berpengaruh pada semakin tingginya kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010.

Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adventana, Gabriela Ara (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa Komitmen Organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kesiapan Penerapan SAP berbasis akrual. Selain itu menurut Julita (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa karyawan yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi akan mengerahkan segalanya kepada organisasi untuk membantu organisasi dalam menjalani perubahan, komitmen organisasi menurut prediktor terbaik dalam perubahan dibandingkan dengan kepuasan kerja. Hal ini menandakan terdapat komitmen organisasi yang tinggi untuk menyukseskan penerapan SAP berbasis akrual. Responden juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai Signifikansi untuk sistem informasi adalah 0,028. Nilai 0,028 lebih kecil dari α 0,05 sehingga pada tingkat keyakinan 95% variabel sistem informasi berpengaruh

secara signifikan terhadap kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010. Nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,283 bernilai positif, yang berarti sistem informasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sistem informasi akan berpengaruh pada semakin tingginya kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010.

Hal ini konsisten dengan penelitian Machmud, Rizan (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sistem informasi manajemen dengan kinerja pegawai. Selain itu hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Sugandi (2012) dengan hasil penelitian bahwa agar dapat terlaksananya pengelolaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi yang memadai. Karena, teknologi informasi tersebut baik secara *hardware* maupun *software*, akan dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan. Menurut Warsino (2009) yang menyatakan bahwa dengan komunikasi yang baik, seluruh komponen dalam organisasi akan dapat bekerja secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang berbasis *software* dapat mendukung penerapan SAP berbasis akrua, karena dengan sistem *software* yang mendukung kegiatan dapat memudahkan pengguna dalam operasionalnya.

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa besarnya nilai *R square* adalah sebesar 0,583 ini berarti pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasidan sistem informasi terhadap kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun

2010 sebesar 58,3 persen sedangkan sisanya sebesar 41,7 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan yang diperoleh adalah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Badung Tahun 2015, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Badung Tahun 2015, dan sistem informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Badung Tahun 2015

Berdasarkan simpulan tersebut maka dapat diajukan saran kepada pegawai bagian keuangan diharapkan selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas diri dan mempunyai kompetensi yang baik serta diharapkan atas ditetapkannya PP No 71 Tahun 2010 pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Badung Tahun 2015 dapat memberikan bimbingan secara teknis kepada pegawai yang menangani bidang tersebut.

REFERENSI

- Aldiani, Sulani, 2010. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu *Jurnal Akuntansi 12, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Ardiansyah, 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi

Kasus pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang). *Skripsi*. Malang. Universitas Brawijaya.

Cummings & Worley. 2005. *Organizational Development & Change*. Edisi ke-8. Ohio : Thomson South-Western.

Cushing, Barry. E. 1995. *Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan*. Di-terjemahkan Oleh: Ruchyat Kosasih). Erlangga. Jakarta

Choirunisah, Farizsiah. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*. 1 (3) h: 79-92.

Faradillah, A. 2013. *Analisis Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010)*. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hassanuddin.

Fajrianthi, Ayu Bianda Pramadani. 2012. Hubungan Antara Komitmen Organisasi dengan Kesiapan untuk Berubah pada Karyawan Divisi Enterprise Service (DES) Telkom Ketintang Surabaya. *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*. 1 (2), h: 102-109.

Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Herlina, Hetti. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Univeritas Padjajaran*.

Invancevic, John M., Konopaske, Robert., T. Matteson, Michael. 2005. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Terjemahan Gina Gania. Jakarta : Erlangga.

Jogiyanto, 2008. *Pedoman Survei Kuesioner : Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respons*. Yogyakarta : BPFEE.

Julita, Santi. 2010. *Relationship Between Organisational Commitment, Locus of Control and Radiness to Change Among Nurses*. *Thesis*. Malaysia. International Islamic University.

Kusnadi. 1999. *Akuntansi Pemerintahan (Publik)*. Malang: Universitas Brawijaya

Lehman, Wayne E. K., 2002. Assesing Organizational Readiness for Change. *Jornal of Substance Abuse Treatment*. 22 : h: 197-209.

- Maulida, Fathia. 2009. Analisis Kesiapan Organisasi Dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. *Tesis*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Mohmmaed and Eleswed, 2013. Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Correlational Study in Bahrain. *International Journal of Business, Humanities and Technology Vol.3 No.5; May 2013*.
- Nash, John F., diterjemahkan oleh La Midjan. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi I Pendekatan Manual Praktika Penyusunan Metode dan Prosedur*, Bandung : Lembaga Informasi Akuntansi.
- Nugroho, Agus. 2005. *Strategi Jitu : Memilih metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Rahmayati, Fitri. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Surabaya II). *Skripsi*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Ritonga, Rahmansyah. 2006. Kas Basis VS Akrual Basis. *Jurnal (Online)*. Tersedia di (<http://sumut.kemenag.go.id/>)
- Sari, Fatma Puspa. 2009. Kesiapan Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menyongsong Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Tesis*. Jakarta : Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Sugandi, Joe. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada SKPD se-Kabupaten Kuansing). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*
- Smith, Ian. 2005. *Achieving Readiness for Organizational Change*. USA : Library Management

Sumarsono, Sony. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Graha Ilmu Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400, Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Republik Indonesia, Jakarta.

Warsino, 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. *Tesis*. Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, Republik Indonesia, Jakarta.